

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota tersebut, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan keuangan yang komprehensif. Nugraheni (2008:2) “pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangannya mengikuti standar akuntansi pemerintah yang dituangkan dalam PP No.24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Santoso dan Pambelum (2008) “Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi keuangan secara umum yang lebih

berkualitas bagi para pengguna laporan keuangan di dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Pradja (2006), dengan berpedoman dengan SAP, maka diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara relevan dan handal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun pada faktanya kualitas laporan keuangan pemda di Indonesia masih sangat buruk bahkan masih banyak laporan keuangan pemda yang memperoleh opini *disclaimer*. Ini bisa dilihat dari hasil pemeriksaan BPK atas 275 LKPD Tahun 2007 yang dilakukan pada semester I TA 2008 menunjukkan bahwa 3 LKPD yang memperoleh opini WTP, 173 LKPD dengan opini WDP, 48 LKPD dengan opini TMP dan 51 LKPD dengan opini TW. Dan dalam hasil pemeriksaan Kabupaten Samosir memperoleh opini WDP. Dan tidak satupun pemerintah daerah yang bisa memenuhi penyampaian laporan keuangan tepat pada waktunya.

Belum tertibnya pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh masih terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, unsur kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Nasaruddin (2008:2) "sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan".

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan SAP, maka perlu diperhatikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dengan

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, seperti pemahaman akan SAP. Pemahaman terhadap SAP ini diperlukan agar hasil laporan keuangan daerah lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan). Tetapi Justika (2010) “menilai dalam penerapan PP No.24 Tahun 2005, masih banyak Pemda yang terkendala disebabkan masih banyak aparatur pemda yang tidak termotivasi untuk mempelajari SAP”.

Selain pemahaman terhadap SAP, latar belakang pendidikan juga harus perlu diperhatikan. Dengan memperhatikan latar belakang pendidikan dari perangkat SKPD, maka akan berhubungan dengan tingkat pemahaman terhadap SAP, sehingga akan membantu dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Namun menurut Menpan (2005) bahwa “tingkat pendidikan birokrasi Negara Indonesia sebagian besar berpendidikan SLTA, dan rendahnya tingkat pendidikan ini sangat mempengaruhi inovasi dan kreativitasnya dalam mengambil keputusan”. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dimana seharusnya dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas.

Selain pemahaman terhadap SAP dan latar belakang pendidikan, maka faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) terhadap aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pendidikan dan pelatihan sudah saatnya dilakukan, karena pada umumnya pengelola keuangan masih gamang bekerja sebab belum mengetahui dan memahami peraturan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sangat pentingnya pendidikan dan pelatihan ini dikarenakan banyaknya peraturan yang sudah berubah. Dengan terbitnya PP No.

24 Tahun 2005 tentang SAP diharapkan semua pengelola keuangan daerah harus benar-benar memahaminya dan dapat melaksanakannya secara praktis di lapangan, terutama dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pendidikan dan Pelatihan ini diperlukan agar aparatur SKPD tidak mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah karena telah terbiasa melalui adanya pendidikan dan pelatihan. Namun pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berlaku dewasa ini bersifat formalitas guna memenuhi persyaratan jabatan, akibatnya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan kurang efektif dan efisien.

Pentingnya pemahaman, pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam penyusunan laporan keuangan daerah, menarik beberapa peneliti untuk meneliti hal tersebut. Diantaranya adalah Enho (2008) yang telah meneliti pengaruh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan serta latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Hasilnya menunjukkan bahwa (a) pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan mampu menjelaskan penyusunan laporan keuangan, (b) pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan, (c) secara parsial, pemahaman SAP (X_1), pendidikan dan pelatihan (X_2) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan serta memiliki hubungan yang negatif terhadap penyusunan laporan keuangan daerah. Sedangkan latar belakang pendidikan (X_3), mempunyai hubungan yang positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah.

Untuk itu peneliti tertarik untuk mengulang penelitian Enho tersebut. . Peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pengaruh Pemahaman**

SAP, Pendidikan dan Pelatihan serta latar belakang pendidikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Samosir”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman SAP berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan?
2. Apakah Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan?
3. Apakah Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan?
4. Apakah ada hubungan signifikan antara pemahaman SAP, Pendidikan dan Pelatihan, serta Latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan?

1.3 Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis untuk meneliti, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji pemahaman SAP, Pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan para Aparat SKPD yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Samosir.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman SAP secara parsial berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD pada Kabupaten Samosir?
2. Apakah Pendidikan dan pelatihan secara parsial berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD pada Kabupaten Samosir?
3. Apakah latar belakang pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD pada Kabupaten Samosir?
4. Apakah pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan secara simultan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD pada Kabupaten Samosir?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman SAP perangkat SKPD secara parsial terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Samosir.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan secara parsial terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Samosir.
3. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan secara parsial terhadap Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Samosir.

4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan secara simultan terhadap penyusunan laporan keuangan SKPD pada Kabupaten Samosir.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memperdalam pengetahuan peneliti tentang pengaruh pemahaman SAP, pendidikan dan pelatihan serta latar belakang pendidikan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi pemerintah daerah

Diharapkan sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan SDM dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP melalui pemahaman terhadap SAP, serta pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan latar belakang pendidikan.

3. Bagi pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih lanjut mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.